

Berbagai Opsi Pembiayaan Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) : Peluang & Tantangan

Oleh: **DR. Irfa Ampri**

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan



**Seminar Nasional Pembiayaan Perubahan Iklim
Jakarta, 23-24 Oktober 2013**

Outline

1

• **Pendahuluan**

2

• **Opsi Kebijakan & Instrumen Pendanaan**

3

• **Hibah RAD-GRK – Sebuah Peluang**

4

• **Tantangan & Strategi ke Depan**





1

• **Pendahuluan**

Kebijakan RAN & RAD-GRK

- Perpres No.61/2011 ttg Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) :

Pasal 11 :

Pendanaan RAN/RAD-GRK bersumber dari APBN, APBD dan sumber2 lain yang sah dan tak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 6 (ayat 1) :

Untuk menurunkan emisi GRK dimasing-masing wilayah provinsi, Gubernur harus menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)



Penurunan Emisi GRK

Perlu Biaya Besar & Terus Menerus

- ❑ Pelaksanaan Perpres no.61/2011 utk Penurunan Emisi GRK merupakan upaya dgn cakupan luas & lintas sektor; memerlukan biaya skala besar yang harus setiap tahun dikeluarkan Pemerintah hingga tercapai target penurunan emisi pada tahun 2020.
- ❑ Dari APBN 2012 saja anggaran terkait kegiatan RAN-GRK mencapai sekitar Rp 15,9 trilyun
- ❑ Kajian *Mitigation Fiscal Framework (MFF, 2012)* menunjukkan bhw pembiayaan dari sumber APBN dan APBD saja tidak akan cukup, karena hanya akan bisa menurunkan +/- 15% emisi saja dari target RAN-GRK ditahun 2020; sisanya (85%) harus dibiayai dari sumber-sumber dana lainnya.

Kajian *Mitigation Fiscal Framework* (MFF-1 2012)

- MFF merupakan jembatan yang mengaitkan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan pembiayaan yg diperlukan
- MFF akan mendukung dalam menentukan :
 - Biaya & sumberdaya yang diperlukan utk pelaksanaan RAN-GRK
 - Melihat efektivitas biaya (*cost-effectiveness*) yang dikeluarkan untuk kegiatan mitigasi
 - Kebijakan ekonomi & fiskal dan kelembagaan yang diperlukan untuk pencapaian target RAN-GRK



Temuan Utama MFF (1)

- ❑ MFF Pertama fokus pada aksi mitigasi di sektor kehutanan, lahan gambut, energi dan transportasi yang mencakup 93% target pengurangan emisi nasional
- ❑ Anggaran APBN terkait dengan kegiatan mitigasi RAN-GRK di tahun 2012 sekitar Rp 15,9 trilyun
- ❑ Jika pembiayaan RAN-GRK dipertahankan di level yang sama dgn anggaran thn 2012, penurunan emisi yang dicapai hanya **15%** (116 mtCO₂e) dari target 767 mtCO₂e.
- ❑ Jika pengeluaran pemerintah sebesar pertumbuhan ekonomi, akan menambah 4% penurunan emisi
- ❑ Jika diprioritaskan pada proyek yang paling efektif di sisi biaya dan efisien, akan menambah 10% pengurangan emisi



Temuan Utama MFF (2)

- ❑ Jika deforestasi hutan dapat dibatasi 450,000 ha/tahun, akan menambah 34% penurunan emisi
- ❑ Jika mitigasi dari pembangkit listrik rendah karbon juga dimasukkan, akan menambah 14% penurunan emisi
- ❑ Sisa target penurunan emisi sebesar 23% di tahun 2020 dicapai melalui kegiatan reforestasi yang dilakukan swasta dan CSO
- ❑ Total biaya untuk sektor kehutanan, lahan gambut, energi dan transportasi diperkirakan antara Rp 100 dan Rp 140 triliun , yang akan ditanggung oleh pemerintah dan swasta
- ❑ Akan ada berbagai dampak → di sisi anggaran (pemerintah, swasta, dan CSO) dan pertumbuhan ekonomi (positif/negatif)



2

- **Opsi Kebijakan dan Instrumen Pendanaan**



Sumber Pendanaan yang Ada

- ❑ **Dana Publik :** APBN, APBD , Dana Perwalian
- ❑ **Dana Non-Publik dari Dalam Negeri :**
 - Dana perusahaan Swasta
 - Dana perusahaan BUMN
 - Dana Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) /Lembaga2 Filantropi
 - Dana-dana masyarakat lainnya
- ❑ **Dana-dana Internasional :**
 - Dana2 Hibah bilateral & multilateral dari LN
 - Dana2 Hibah dari lembaga2 filantropi LN
 - Dana2 Pinjaman & Investasi dari negara & swasta luar negeri



Dana-dana Internasional utk Perubahan Iklim

- **Dana untuk PI dalam kerangka Konvensi (UNFCCC):**
 - Dana *Global Environment Facility (GEF)*
 - Dana Adaptasi (*AF, Adaptation Fund*) – Bali Action Plan
 - *Fast Start Finance (FSF)* – pasca Copenhagen 2009
 - *Green Climate Fund (GCF)* - COP 16 Cancun 2010
- **Dana Multilateral untuk PI diluar Kerangka Konvensi**
 - *Climate Investment Fund (CIF)* – World Bank/MDBs
 - Clean Technology Fund – Strategic Climate Fund – *Forest Investment Program (FIP)* and *Scaling-up Renewable Energy Program for Low Income Countries (SREP)*
 - *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)* - MDBs
 - UN-REDD Program - UNDP, UNEP, FAO



Mekanisme & Instrumen Pendanaan untuk Penurunan Emisi GRK

❑ Sumber Dana dari Pemerintah Pusat :

- Dana Sektoral untuk belanja K/L dari dana hibah
- Dana Dekonsentrasi untuk belanja K/L dari dana hibah
- Dana Tugas Pembantuan untuk belanja K/L dari dana hibah

❑ Sumber Dana dari Penerimaan Dalam & Luar Negeri :

- Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk lingkungan/emisi GRK
- Hibah Daerah untuk pembiayaan kegiatan tertentu
- Dana Insentif Daerah (DID) untuk pencapaian kinerja tertentu



Skema Moneter utk Pembiayaan Penurunan Emisi GRK

□ Dana Publik :

- Keterbatasan Anggaran Pemerintah
- Digunakan untuk "*leveraging*" (memancing & mendorong) investasi Swasta
- Pentingnya peran anggaran K/L dan transfer fiskal

□ Dana Swasta :

- Diperlukan untuk investasi prasanana & sarana
- Perlu insentif fiskal dan non-fiskal
- Peran K/L terkait dalam perumusan kriteria & indikator



Skema Non-Moneter Pembiayaan untuk Penurunan Emisi GRK

□ Kebijakan :

- Aturan & insentif untuk hemat energi untuk kantor Pemerintah, BUMN, Sekolah, fasilitas umum & sosial
- Kebijakan tentang ruang terbuka hijau & penghijauan
- Pengolahan limbah cair & padat untuk Industri & Rumah Sakit
- Aturan & insentif untuk *green building*
- Pengurangan bea masuk untuk peralatan/teknologi rendah karbon, ramah-lingkungan
- Disinsentif fiskal: pajak kendaraan bermotor, tarif parkir, uji emisi, dll



Skema Non-Moneter Pembiayaan untuk Penurunan Emisi GRK (2)

□ **Himbauan & Dukungan**

- Program "CSR" BUMN & Swasta untuk lingkungan & penurunan emisi GRK
- Dukungan lembaga perbankan & lembaga pembiayaan non-bank
- Dukungan terhadap LSM dan gerakan masyarakat daerah utk hemat energi, air & pelestarian lingkungan
- Penghargaan terhadap prakarsa swasta & masyarakat dalam aksi penurunan emisi GRK, konservasi SDA, dll



3

**• Hibah RAD-GRK
– Sebuah Peluang**



Amanat Penyusunan RAD-GRK

Perpres 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)

Pasal 6 ayat (1) :

"Untuk menurunkan emisi GRK di masing-masing wilayah provinsi, Gubernur harus menyusun RAD-GRK."

Pendanaan RAN/RAD-GRK

Pasal 11:

Pendanaan RAN-GRK [RAD-GRK] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan.

**I
S
S
U
E**

Bagaimana skema pendanaan utk RAN-GRK di Daerah (RAD-GRK) ?



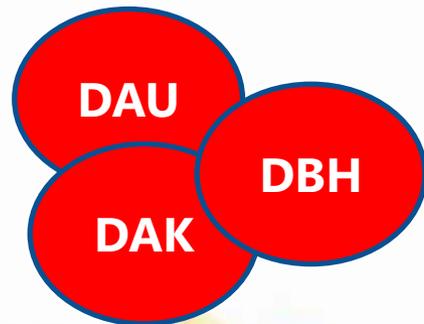
Kebutuhan Pembiayaan RAD-GRK

- ❑ Kajian *Mitigation Fiscal Framework* Fase 1 (MFF,2012): kontribusi pendanaan APBN dan APBD hanya bisa memenuhi penurunan emisi +/- 15% dari target RAN-GRK ditahun 2020 ; sisanya harus dari sumber2 lain.
- ❑ Rencana kebutuhan pendanaan RAD-GRK yg diajukan oleh 32 Provinsi : minimal Rp 200 Triliun
- ❑ Tiga sektor utama memerlukan dana Rp 17,5 Triliun per tahun, atau berjumlah Rp 140,3 T hingga 2020 :
 - Energi & Transportasi : Rp 17,5 T/tahun
 - Pengelolaan Limbah : Rp 46,1 T/tahun
 - Kehutanan & lahan Gambut : Rp 17,4 T/tahun



Mekanisme Transfer Fiskal ke Daerah

Sesuai amanat UU no.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mekanisme Transfer Fiskal ke Daerah menggunakan skema Dana Perimbangan Keuangan : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)

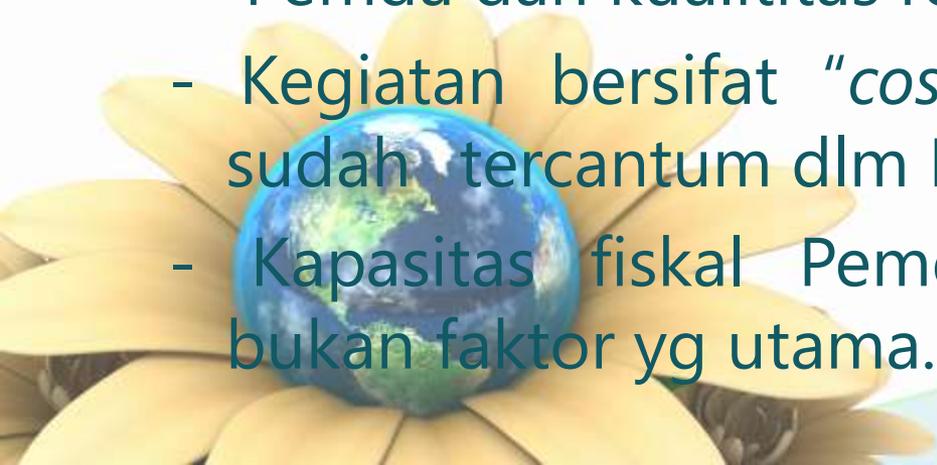


- Dalam jangka pendek, skema **Hibah** dianggap paling *feasible* (*ownership, earmarking project*, partisipasi aktif, targeted);
- Dalam jangka menengah/ panjang dapat digunakan mekanisme **DAK**;



HIBAH APBN utk Pembiayaan RAD-GRK

- Mekanisme Hibah APBN untuk Pembiayaan Kegiatan Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) akan diatur dgn skema Hibah RAD-GRK
- Skema HIBAH utk RAD-GRK akan diarahkan :
 - Sbg '*pilot multi-years project*' utk jangka waktu pendek (3 tahun);
 - Bersifat kompetitif, berdasarkan kesiapan/kinerja Pemda dan kualitas rencana kegiatannya;
 - Kegiatan bersifat "*cost sharing*", "*quick win*", dan sudah tercantum dlm DIPDA
 - Kapasitas fiskal Pemda jadi pertimbangan, tapi bukan faktor yg utama.



Persyaratan Daerah Penerima Hibah RAD-GRK

- ❑ Kegiatan yang diusulkan bersifat *quick win*
- ❑ Telah menyusun dokumen RAD-GRK dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur
- ❑ Telah tercantum dalam DIPDA
- ❑ Menyediakan dana pendamping
- ❑ Menyiapkan *governance* dan pengukuran pencapaian target yang baik



4

**• Tantangan &
Strategi ke Depan**



Tantangan dan Strategi ke Depan (1)

- *Perspektif multi-sektor berjangka panjang dalam pengelolaan perubahan iklim & lingkungan*
 - PI/EH tidak dipandang sebagai isu lingkungan saja, namun juga perlu dilihat sebagai kegiatan PEMBANGUNAN. Dalam jangka menengah dan panjang: penguatan industri, pertanian & transportasi untuk mendukung tujuan ketahanan energi, ketahanan pangan, keanekaragaman hayati, dan berpotensi menjadi *new source of growth*.
 - Untuk efektifitas dan efisiensi pendanaan, diperlukan peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan (pemerintah pusat dan daerah, pemerintah dengan swasta, *development partners*, dan masyarakat).



Tantangan dan Strategi ke Depan (2)

- *Konteks fleksibilitas anggaran berjangka menengah*
 - Dana APBN terbatas dan hanya sebagai stimulus untuk *scaling up* investasi swasta & masyarakat
 - Belanja modal terkait dengan kegiatan mitigasi perlu didukung perencanaan anggaran dengan kerangka jangka menengah (*medium term framework, 3-5tahun*) dengan mempertimbangkan *sustainability* anggaran secara keseluruhan.
 - Terkait dengan belanja subsidi, terdapat perbaikan target subsidi energi (*regressive subsidy*) dan *phase out* secara gradual.



Tantangan dan Strategi ke Depan (3)

- ❑ *Potensi dan dukungan pendanaan lainnya yang perlu dikembangkan*
 - Selain menggalang potensi swasta & masyarakat, juga perlu mengoptimalkan dukungan dari *Development Partners* (DP) & lembaga-lembaga multilateral yang cukup besar serta bervariasi.
 - Persiapan yang perlu dilakukan: program dan sistem manajemen data/informasi, kegiatan prioritas (alih teknologi, penguatan kapasitas SDM & kelembagaan), dan *accountability system*.
 - Dukungan pihak eksternal diupayakan tidak bermuara pada penambahan beban utang negara.



Terima Kasih

